

## **PARIWISATA KEBANGSAAN: TOLERANSI DAN PLURALISME DI DESA WONOREJO, KABUPATEN SITUBONDO**

*(National Tourism: Tolerance and Pluralism in Wonorejo Village, Situbondo Regency)*

RUSDI HIDAYAT<sup>1)</sup>, RESA RASDIYAH<sup>1)</sup>, BUDI PRABOWO<sup>1)</sup>, PRAJA FIRDAUS NURYANANDA<sup>2)</sup>  
DAN A. MUAMMAR ALAWI<sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> UPN “Veteran” Jawa Timur

<sup>2)</sup> Center for Glocalisation Studies (CGaS)

\*Email: [firdaus.praja@gmail.com](mailto:firdaus.praja@gmail.com)

**Diterima 27 Agustus 2021 / Disetujui 31 Desember 2021**

### **ABSTRACT**

*Located very near to Baluran National Park and eastern-coast of East Java, Wonorejo village is a very potential area for tourism. This village was labelled as “the village of nationhood”. The label didn’t come out of nothing. Wonorejo has a very pluralistic society. There reside three religions, they are Islam, Christian, and Hindu. As it seems to reflect Indonesian “Bhinneka Tunggal Ika”, they live there in harmony and a very high level of tolerance. Wonorejo thus become regular tourism destination, especially for people who loves nature. But, this village is not without problems. One of the problems we found is in their tourism management. Using participatory observation and in-depth interviews, our research did found loopholes in this wonderful village. Their problems consist of lackness of collective management, uneven development, and leadership crisis. By using ABCD (asset-based community development) approach, the research aims to identify and to give alternative solutions for the problems they have. To become a fully natural-entertaining tourism destination with pluralism and tolerance in the society would be a very noble purpose for this research to achieve.*

*Keywords: nationhood, tourism, pluralism, tolerance, village*

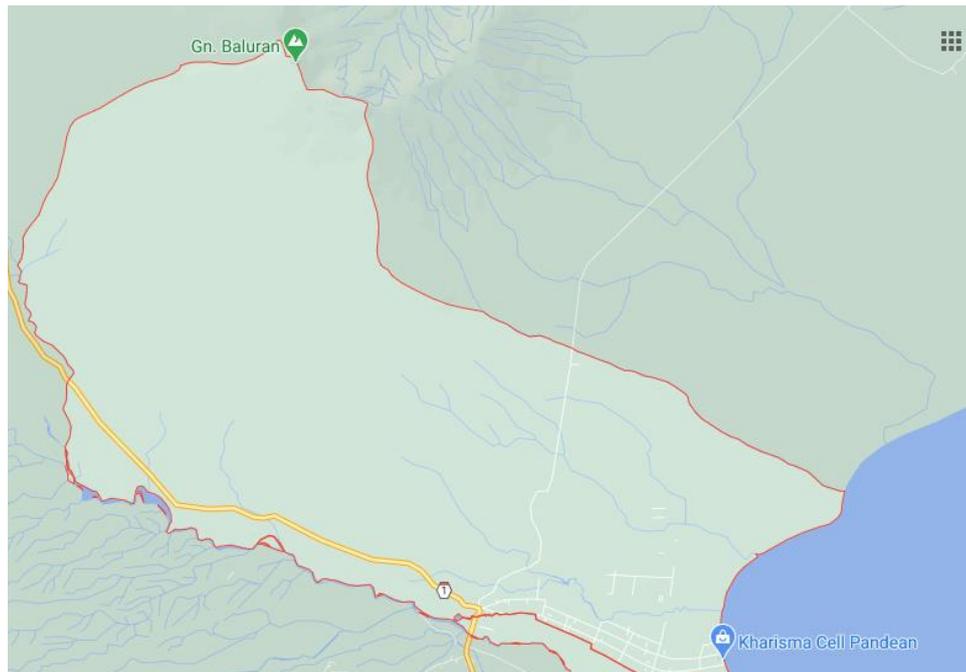
### **ABSTRAK**

*Terletak sangat dekat dengan Taman Nasional Baluran dan pantai timur Jawa Timur, desa Wonorejo merupakan daerah yang sangat potensial untuk pariwisata. Desa ini diberi label sebagai “desa kebangsaan”. Label tidak muncul begitu saja. Wonorejo memiliki masyarakat yang sangat pluralistik. Di sana tinggal tiga agama, yaitu Islam, Kristen, dan Hindu. Karena seolah-olah mencerminkan “Bhinneka Tunggal Ika” Indonesia, mereka hidup di sana dengan rukun dan tingkat toleransi yang sangat tinggi. Wonorejo dengan demikian menjadi tujuan wisata reguler, terutama bagi orang-orang yang mencintai alam. Tapi, desa ini bukannya tanpa masalah. Salah satu kendala yang kami temukan adalah dalam pengelolaan pariwisata mereka. Menggunakan observasi partisipatif dan wawancara mendalam, penelitian kami menemukan celah di desa yang indah ini. Masalah mereka terdiri dari kurangnya manajemen kolektif, pembangunan yang tidak merata, dan krisis kepemimpinan. Dengan menggunakan pendekatan ABCD (pengembangan masyarakat berbasis aset), penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memberikan alternatif solusi atas permasalahan yang mereka hadapi. Menjadi destinasi wisata yang sepenuhnya menghibur alam dengan pluralisme dan toleransi dalam masyarakat akan menjadi tujuan yang sangat mulia untuk dicapai penelitian ini.*

*Kata kunci: kebangsaan, pariwisata, pluralisme, toleransi, desa*

### **PENDAHULUAN**

Desa Wonorejo merupakan desa yang unik, baik secara letak geografis maupun dari aspek sosial serta kebudayaan. Desa ini masuk dalam daerah administrasi Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo. Desa Wonorejo sendiri terletak tepat di samping Taman Nasional Baluran dan pesisir timur provinsi Jawa Timur. Lebih rinci, Wonorejo juga terletak tepat bersebelahan dengan Gunung Baluran. Letak geografis ini secara alami memberikan banyak keuntungan kepada Desa Wonorejo, diantaranya adalah tanah yang subur, sumber daya alam kelautan yang melimpah, dan potensi pariwisata yang besar sekali. Oleh karena itu, desa ini memiliki kehidupan yang beragam, mulai dari pekerjaan sebagai petani sampai nelayan, mulai dari penduduk yang berfokus pada pariwisata sampai penduduk yang menjadi pegawai pemerintah. Lebih unik lagi, desa ini diberikan label sebagai “Desa Kebangsaan” karena ada tiga agama yang dianut masyarakat Desa Wonorejo, yaitu Islam, Kristen, dan Hindu.



Gambar 1. Citra visual Google untuk Desa Wonorejo, Kecamatan Banyuputih, Kab. Situbondo (sumber: maps.google.com)

Walau masyarakat Desa Wonorejo memiliki perbedaan dalam hal kepercayaan, akan tetapi mereka dapat hidup rukun dan sejahtera berdampingan satu sama lain. Bahkan, menurut hasil wawancara dengan Slamet, Kepala Urusan Kesejahteraan Masyarakat Pemerintah Desa Wonorejo, masyarakat desa saling membantu dalam pembangunan tempat ibadah masing-masing. Kalangan muslim pun tidak segan menghadiri perayaan acara warga yang beragama Kristen. Begitu pula dengan kalangan Hindu yang sama sekali tidak dipermasalahkan ketika membangun pura di sebelah masjid warga. Ada pula kegiatan utama desa yang diperingati setiap tahun, seperti Bersih Desa dan Petik Laut. Kesemua kegiatan ini mempertemukan seluruh masyarakat Desa Wonorejo dalam satu tempat dan waktu. Menurut Slamet, tidak ada satu pun kontraksi sosial yang ada di Desa Wonorejo selama ini. Kerukunan dan toleransi ini bukan hal yang baru di Desa Wonorejo. Kerukunan hidup ini telah diturunkan selama berpuluh-puluh tahun oleh sesepuh desa. Nampaknya, kerukunan ini didorong dari adanya perasaan senasib-sepenanggungan oleh masyarakat desa yang mayoritas merupakan masyarakat pendatang dari daerah aslinya masing-masing.

Desa Wonorejo pada akhirnya menjadi sebuah destinasi pariwisata yang sangat menarik. Dengan lokasinya yang sangat strategis, tumbuh banyak penginapan sebagai akomodasi pariwisata bagi wisatawan yang ingin menghabiskan waktu di Taman Nasional Baluran. Begitu juga dengan lokasi desa yang lebih dekat Kabupaten Banyuwangi daripada pusat Kabupaten Situbondo menjadikan desa ini sebagai tempat persinggahan para wisatawan yang ingin melanjutkan perjalanan ke Banyuwangi atau Bali dan lebih ke timur lagi. Desa ini juga menjadi jalur utama moda transportasi darat dengan trayek pantura (pantai utara), selama akses pada jalan tol belum dibangun dan difungsikan. Sehingga banyak kendaraan roda empat dan kendaraan besar lainnya melewati desa ini.

Namun demikian, Desa Wonorejo bukan berarti desa yang tidak memiliki permasalahan. Desa ini memang tidak nampak memiliki permasalahan yang berarti, baik dalam aspek sosial, budaya, bahkan ekonomi. Akan tetapi jika diteliti dengan sungguh-sungguh, Wonorejo masih memiliki beberapa permasalahan yang berpotensi menjadi silang sengkabut masalah di kemudian hari. Tim peneliti telah melakukan wawancara dengan Trisno, Sekretaris Desa, mengenai beberapa problem yang ada di Desa Wonorejo. Demikian pula wawancara dengan Slamet yang memakan waktu lebih lama dan tim peneliti pun mendapatkan deskripsi kondisi dan permasalahan yang lebih komprehensif. Selain itu, tim peneliti juga mendapatkan beberapa informasi pendampingan dari Yayasan Genta Purwa Desawarnana yang telah mendampingi Wonorejo lebih dari satu tahun yang lalu.



Gambar 2. Wawancara dengan Trisno, Sekretaris Desa Wonorejo.  
(sumber: dokumentasi peneliti)

Permasalahan pertama yang ditemukan tim peneliti adalah pengelolaan kepariwisataan yang masih belum maksimal. Melalui keterangan yang didapat dari Trisno dan Slamet, mayoritas warga Wonorejo yang memiliki usaha di bidang pariwisata masih melakukan pengelolaan secara mandiri. Akomodasi penginapan yang berupa *homestay* di sepanjang jalan masuk desa merupakan bisnis yang dikelola rumah tangga, tanpa adanya campur tangan pengelolaan dari pihak desa. Hal ini bukan baru saja terjadi, namun sudah lama pengelolaan dipraktikkan seperti ini. Pihak desa juga merasa tidak memiliki *bargaining position* untuk melakukan intervensi positif terhadap pengelolaan kepariwisataan di Desa Wonorejo. Bagi tim peneliti, tentu ini dapat dikategorikan sebagai pengelolaan yang belum maksimal karena pada praktiknya pengelolaan dilakukan secara mandiri, sehingga keuntungan yang didapatkan juga akan bersifat mandiri dan sangat tersegmentasikan. Hal ini juga yang diduga turut memberikan kontribusi pada pemerataan kesejahteraan yang kurang antara masyarakat yang hidup berdekatan dengan Taman Nasional Baluran dengan masyarakat yang hidup di daerah pesisir.

Permasalahan kedua adalah kesenjangan kesejahteraan masyarakat, antara masyarakat yang hidup berdekatan dengan Taman Nasional Baluran dan masyarakat yang hidup di daerah pesisir. Kesejahteraan ini tercermin dari pendapatan rerata masyarakat dan lingkungan dimana mereka tinggal. Tim peneliti telah menemukan memang ada kesenjangan pendapatan rata-rata antara masyarakat yang tinggal berdekatan dengan hutan (Taman Nasional Baluran) dengan masyarakat yang tinggal di daerah pesisir. Masyarakat yang tinggal berdekatan dengan hutan rata-rata memiliki faktor produksi lebih dari satu, yakni akomodasi pariwisata (penginapan), toko kelontong, dan lahan pertanian. Sehingga sumber produksi masyarakat di daerah hutan relatif lebih dari satu. Sedangkan kondisi yang berbeda dihadapi oleh masyarakat yang hidup di daerah pesisir. Mereka hanya mengandalkan satu faktor produksi, yakni tangkapan ikan. Sedangkan pada bulan Agustus sampai November para nelayan tersebut tidak melaut dikarenakan kondisi cuaca. Sehingga para nelayan Wonorejo memiliki waktu 4 bulan tanpa produksi dan kemungkinan juga tanpa pendapatan. Kontrasnya kondisi ini yang sedikit banyak mempengaruhi tingkan kesejahteraan di masing-masing wilayah. Tentu hal ini adalah potensi permasalahan.

Sedangkan permasalahan terakhir adalah krisis kepemimpinan. Periode sekarang adalah periode yang mana Desa Wonorejo memiliki struktural kepemimpinan tapi masih sangat kurang dalam hal mental kepemimpinan. Hal ini tercermin dari inovasi desa yang sangat kecil, padahal potensi Desa Wonorejo sangatlah besar. Termasuk pengelolaan akomodasi pariwisata yang masih dikelola secara mandiri oleh warga dan masih belum adanya inovasi struktural yang mampu membawa kesejahteraan yang lebih baik kepada masyarakat Wonorejo.

Dari tiga uraian permasalahan di atas, tim peneliti kemudian menggunakan pendekatan ABCD (*asset-based community development*), *leadership* (kepemimpinan), dan *ecotourism* (ekowisata) untuk memberikan rancangan alternatif solusi dan strategi bagi desa. Adapun penelitian yang dilakukan menggunakan metode pencarian data dengan observasi partisipatif dan *in-depth interview* (wawancara mendalam). Observasi yang dilakukan peneliti tidak hanya sekedar observasi tetapi juga berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat desa. Sedangkan wawancara yang dilakukan peneliti hanya sebatas pemerintah desa saja. Sehingga seluruh informasi yang didapat dari observasi dan wawancara akan dianalisis lebih lanjut dengan memberikan sudut pandang dari tim peneliti dan kontekstualisasi.

## KERANGKA PIKIR

### **Pendekatan ABCD (*asset-based community development*)**

Pendekatan ini pertama kali dikembangkan oleh Kretzmann dan McKnight (1993). Sekarang pun pendekatan ini masih banyak digunakan dan bahkan dikembangkan menjadi Institute of Asset Based Community Development di Amerika Serikat. Pendekatan ini bertolak belakang dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana kita umumnya mengenal. Perbedaan-perbedaan pula yang kemudian memberikan hasil pemberdayaan yang berbeda dan lebih mampu menjaga kelestarian sosial kemasyarakatan di daerah lokal. Pada paragraf selanjutnya akan dijelaskan beberapa perbedaan tersebut.

Perbedaan pertama dan paling mendasar adalah perbedaan *mindset* atau arah pemikiran. Pada umumnya pemberdayaan masyarakat adalah diskursus pembangunan yang melihat terdapat kesenjangan pada masyarakat rural dan masyarakat urban, atau satu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat yang lain. Kesenjangan tersebut dipandang sebagai ketidakmampuan suatu kelompok masyarakat untuk mencapai titik kesuksesan tertentu. Akhirnya kegiatan pemberdayaan masyarakat sering menitikberatkan pada potensi yang dimiliki oleh kelompok masyarakat yang tidak mampu tersebut agar kemudian berdaya dan bangkit meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Arah pemikiran seperti ini tidak salah sebenarnya, namun yang terjadi seringkali adalah pemaksaan sebuah sistem hidup kepada kelompok masyarakat lain yang sangat berlawanan dengan kebiasaan atau sistem hidup mereka selama ini. Akibatnya, kelompok masyarakat tersebut seringkali kebingungan dan hasil yang kegiatan pemberdayaan masyarakat tersebut berhenti di tengah jalan atau tidak maksimal sesuai dengan idealnya. ABCD kemudian membalik arah pemikiran tersebut. Alih-alih melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan mengandalkan potensi, ABCD justru mengandalkan aset yang selama ini dimiliki oleh sebuah kelompok masyarakat dan telah membentuk sistem kehidupan kelompok masyarakat tersebut. ABCD kemudian tidak melihat adanya kesenjangan antara satu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat yang lain, karena memang pada dasarnya mereka adalah dua entitas yang berbeda dan tidak menuntut untuk dipersatukan (Kretzmann dan McKnight 1993). Oleh karena itu, beberapa fondasi berpikir dan bertindak di pendekatan ABCD bersifat positif dan mengapresiasi, diantaranya *appreciative inquiry*, *positive psychology*, *positive deviance*, dan *participative approach*.

Perbedaan kedua adalah signifikansi aktor pemberdaya. Jika pada umumnya kegiatan atau pemikiran-pemikiran tentang pemberdayaan masyarakat selalu mengandalkan aktor eksternal (berasal dari luar kelompok masyarakat yang diberdayakan), maka ABCD justru lebih mengandalkan aktor internal (berasal dari dalam kelompok masyarakat yang diberdayakan). Pada metode ACBD, aktor yang berperan signifikan ini disebut dengan *local champion*. ABCD menekankan bahwa untuk memberdayakan masyarakat dengan pengelolaan aset, maka dibutuhkan figur/aktor yang sangat mengerti tentang sistem kehidupan masyarakat mereka sendiri. Dengan demikian, kegiatan pemberdayaan masyarakat dipercaya akan menemukan titik optimal. Para *local champion* ini tidak harus figur perorangan yang memiliki kekuasaan/kekuatan struktural, seperti para pejabat di pemerintahan desa (Dwiridhotjahjono dkk 2020). *Local champion* bisa berasal dari kalangan pemuda atau paruh baya yang memiliki inovasi-inovasi gagasan untuk memajukan kelompok masyarakatnya (Dureau 2013).

Perbedaan ketiga adalah yang diusung ABCD adalah metode ini berangkat dari kekuatan yang dimiliki oleh sekelompok masyarakat lokal. Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan pun bukan dalam rangka menutupi kekurangan, namun lebih kepada peningkatan kekuatan yang dimiliki sekelompok masyarakat lokal (Russel 2016). Cormac Russel dengan cantik mendeskripsikan pendekatan ABCD dengan frasa "*building from what's strong rather than what's wrong*". Artinya, pendekatan ABCD tidak melihat adanya kekurangan sama sekali dalam sebuah kelompok masyarakat. Pendekatan ini justru menghargai seluruh perbedaan yang ada dalam satu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat yang lain.

### **Kepemimpinan (*Leadership*)**

Kepemimpinan adalah faktor penting dalam pemberdayaan masyarakat. Bahkan dalam pendekatan ABCD pun kepemimpinan menjadi salah satu sub-bahasan yang sangat menarik dengan konsep *local champion*-nya. Kepemimpinan juga menjadi salah satu kunci inovasi-inovasi yang terjadi di berbagai daerah. Dalam konteks penelitian ini, konsep kepemimpinan dihadirkan dalam dua sisi. Sisi pertama menghadirkan kepemimpinan sebagai salah satu permasalahan yang ada di Desa Wonorejo. Sedangkan sisi yang lain menghadirkan kepemimpinan sebagai konsep penting untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di Desa Wonorejo tersebut. Pada artikel ini, konsep kepemimpinan dihadirkan untuk membingkai narasi besar pemberdayaan masyarakat bahwa pemberdayaan masyarakat tidak mungkin jika dilakukan tanpa adanya seorang atau beberapa orang pemimpin. Oleh karena itu, kepemimpinan merupakan sebuah keniscayaan dalam pemberdayaan masyarakat maupun dalam pendekatan ABCD.

Kepemimpinan sendiri bukanlah sebuah konsep yang mengutamakan keberhasilan ataupun kekuatan seorang pemimpin. Demikian juga konsep ini juga bukan selalu membicarakan bagaimana melakukan optimalisasi potensi kekuatan yang ada. Akan tetapi konsep ini juga mendiskusikan keunggulan dari mengakui kelemahan dan celah-celah yang dimiliki seorang pemimpin atau kepemimpinan itu sendiri. Deborah *et al.* (1998) menyatakan bahwa letak

kepemimpinan seseorang bukan pada superioritas yang ditunjukkannya. Namun lebih kepada dimensi horizontal yang diolah sedemikian rupa sehingga seorang pemimpin atau seorang yang memiliki jiwa kepemimpinan mampu menunjukkan sisi kemanusiaan yang dimilikinya. Termasuk pengakuan terhadap kesalahan, kelemahan, dan permintaan maaf. Hal ini menjadi lebih penting dan krusial daripada penunjukan sisi superioritas seorang pemimpin.

Lebih lanjut, pada dasarnya setiap pemimpin harus memiliki empat (4) kemampuan dasar yang sifatnya abstrak. Menurut Goffee dan Jones (1998), empat kemampuan tersebut adalah 1) *sensemaking*, 2) *relating*, 3) *visioning*, dan 4) *inventing*. Empat kemampuan dasar ini wajib dimiliki oleh seorang pemimpin, karena kepemimpinan memerlukan kemampuan untuk mengabstraksikan banyak fenomena-fenomena yang ada. Kemampuan pertama adalah *sensemaking*. Kemampuan ini adalah kemampuan untuk membuat segala hal yang menjadi tujuan bersama dapat diterima dengan akal pikiran dan hati nurani. Kemampuan ini sangat penting untuk menggerakkan massa dalam jumlah yang besar dan dengan bermacam-macam karakteristik kelompok. Sedangkan kemampuan dasar *relating* lebih kepada latihan kepekaan kepada fenomena-fenomena yang ada terhadap diri seorang pemimpin. Seringkali pemimpin hanya memaparkan visi dan program tanpa mendasarkan visi dan program tersebut kepada alasan atau argumentasi yang benar-benar jelas. Oleh karena itu, pemimpin harus bisa mengaitkan dan menginternalisasikan nilai-nilai yang ada di dunia nyata sehingga setiap visi dan program yang diusung bisa terkaitkan dan terinternalisasikan nilai-nilainya ke masyarakat banyak. Kemampuan dasar *visioning* adalah kemampuan dasar untuk melihat beberapa langkah ke depan. Kemampuan ini sangat penting untuk menentukan arah tujuan sebuah gerakan atau organisasi di masa depan. Visi yang dicanangkan juga harus konkret dan terukur sehingga tidak akan membingungkan di tengah perjalanan pencapaian. Kemampuan dasar yang terakhir adalah *inventing* atau menciptakan. Kemampuan ini lebih menekankan kepada konkretisasi kemampuan-kemampuan sebelumnya. Dalam *inventing*, para pemimpin dituntut untuk tidak hanya menguasai abstraksi dan konseptualisasi dari banyak hal, akan tetapi juga dituntut untuk mewujudkan segala abstraksi dan konseptualisasi yang telah ditelurkan sebelumnya. Penciptaan hal yang baru ini akan semakin memperkuat karakter kepemimpinan atau pemimpin itu sendiri. Maka, dengan kemampuan *inventing* ini, seorang pemimpin dengan kepemimpinan yang kuat telah melalui proses internalisasi, abstraksi, konseptualisasi, serta yang terakhir aktualisasi.

### **Ekowisata (Ecotourism)**

Ada dua pemahaman tentang ekowisata, yakni pemahaman ekowisata secara konseptual dan pemahaman ekowisata secara pasar. Dalam *booklet* pariwisata yang dikeluarkan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Nias Selatan (2009), pemahaman ekowisata secara konseptual mengacu pada pengembangan pariwisata berkelanjutan yang mendukung konservasi lingkungan dan masyarakat lokal setempat sehingga dapat memberikan keuntungan bagi lingkungan dan masyarakat setempat tersebut pula. Sedangkan pemahaman pasar terhadap ekowisata adalah kegiatan pariwisata yang menjadikan lingkungan atau gerakan “kembali kea lam” sebagai bagian dari atraksi pariwisata yang dikomersialkan.

Sedangkan Fennel (dalam Arida 2017) mendefinisikan ekowisata sebagai wisata yang berbasis pada alam yang berkelanjutan dengan fokus pengalaman dan pendidikan tentang alam, yang dikelola sedemikian rupa sehingga mampu mengurangi perusakan terhadap lingkungan serta memberikan manfaat yang lebih banyak kepada masyarakat lokal. Ekowisata berkembang dari sebuah gelombang alternatif pariwisata (*alternative tourism*) pada periode 1980-an (Arida 2017). Dalam ekowisata sendiri terdapat masyarakat ekowisata atau The International Ecotourism Society (TIES). Definisi TIES sendiri terhadap ekowisata agak berbeda sedikit dengan sebelumnya, yakni lebih menekankan para pertanggungjawaban kepariwisataan terhadap alam dan lingkungan sekitar. Maka, jika sebelumnya ekowisata hanya bisa didekati melalui dua perspektif, yakni perspektif konsep dan perspektif pasar, maka dengan dua definisi terakhir ekowisata dapat didekati juga dalam perspektif pengembangan.

Selain menekankan pada konservasi alam dan lingkungan, hal krusial yang perlu selalu diingat adalah bahwa ekowisata menekankan juga pada ekosistem. Ekosistem disini diartikan juga sebagai lingkungan dimana masyarakat setempat. Oleh karena itu, tidak mengherankan ketika ekowisata sebagai pengejawantahan dari pariwisata berkelanjutan juga selalu membahas tentang masyarakat lokal setempat, selain tentunya alam lingkungan. Beberapa pengembangan ekowisata bahkan bisa menggerakkan masyarakat lokal setempat dari satu profesi ke profesi yang lain. Pulau Komodo menjadi salah satu contohnya yang mana sebagian masyarakat lokal setempat yang dulunya tidak bekerja di sektor pariwisata sekarang sudah mulai berkonsentrasi di pekerjaan sektor pariwisata (Ziku 2015). Inilah salah satu keunggulan dari ekowisata. Selain menjadi aliran dari *new tourism* atau *alternative tourism*, nampaknya ekowisata bisa menggerakkan masyarakat lokal setempat untuk bekerja di sektor pariwisata. Entah sebagai pekerjaan utama atau pekerjaan sampingan. Namun yang jelas menjadi keuntungan adalah masyarakat setempat akan mampu mendapatkan manfaat yang lebih banyak jika sektor pariwisata dikembangkan melalui ekowisata.

## METODE PENELITIAN

### Metode Observasi Partisipatif

Metode observasi partisipatif adalah metode pengamatan yang dibarengi dengan tindakan proaktif peneliti sebagai bagian integral masyarakat dan kehidupan mereka sehari-hari. Data penelitian pun digali dan ditemukan dengan cara yang demikian. Sehingga data-data penelitian tidak akan ditemukan hanya dalam bentuk data, namun juga makna dalam data tersebut. Makna pun terkadang juga tidak hanya makna secara umum tapi juga makna yang spesifik tergantung dari obyek yang dilakukan observasi (Sugiyono 2015). Observasi yang dimaksud disini bukanlah kegiatan penelitian yang hanya mengandalkan indra penglihatan saja, namun juga indra pendengaran dan indra yang lainnya. Sehingga observasi tidak hanya berisi kegiatan melihat, namun juga mendengar dan bahkan berinteraksi dengan masyarakat lokal setempat (Satori dan Komanah 2010).

Sementara itu, menurut Sugiyono (2015), metode observasi partisipatif dapat dibagi lagi menjadi empat (4) kategori, yakni observasi partisipasi pasif, observasi partisipasi moderat, observasi partisipasi aktif, dan observasi partisipasi lengkap. Partisipasi pasif adalah peneliti datang ke lokasi penelitian dan melakukan pengamatan saja, tanpa menjadi bagian yang ada di dalam kegiatan tersebut. Partisipasi moderat adalah peneliti datang ke lokasi penelitian dan melakukan pengamatan serta aktif ikut berkegiatan, namun tidak semua kegiatan masyarakat lokal setempat yang diikuti peneliti. Partisipasi aktif adalah peneliti datang ke lokasi dan melakukan pengamatan serta berkegiatan aktif bersama masyarakat lokal setempat. Sedangkan partisipasi lengkap adalah peneliti datang ke lokasi dan melakukan pengamatan serta berkegiatan aktif bersama masyarakat lokal sehingga peneliti menemukan bahwa sistem kehidupan masyarakat lokal setempat telah terinternalisasi ke diri peneliti.

### *In-Depth Interview* (Wawancara Mendalam)

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang nantinya digunakan untuk mengetahui permasalahan penelitian. Wawancara bisa dilakukan dengan tatap muka maupun melalui media komunikasi (telepon, surat elektronik, panggilan video, dan lainnya). Menurut Sutrisno Hadi (dalam Sugiyono 2015) ada tiga (3) asumsi yang harus dipegang peneliti jika ingin melakukan pengumpulan data dengan metode wawancara. Asumsi pertama adalah bahwa subyek (responden) adalah yang paling tahu tentang dirinya sendiri. Asumsi kedua adalah apa yang dinyatakan atau disampaikan oleh responden kepada peneliti adalah benar adanya. Asumsi ketiga adalah interpretasi responden terhadap pertanyaan dari peneliti adalah sama (Sugiyono 2015).

Wawancara dalam konteks penelitian ini dilakukan dengan percakapan tatap muka antara pewawancara dengan sumber informasi, dimana pewawancara bertanya langsung kepada informan tentang sebuah objek atau fenomena yang hendak diteliti. Informasi yang didapatkan dari wawancara dapat bersifat mendalam serta detail. Wawancara yang dilakukan bersifat semi-terstruktur, artinya pewawancara telah memiliki poin-poin pertanyaan yang telah disusun sebelumnya, namun tetap membuka peluang pengembangan pertanyaan dari informasi yang didapat dari informan. Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori *in-depth interview* dimana dalam pelaksanaannya dilakukan wawancara yang terstruktur namun lebih fleksibel. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah menemukan permasalahan lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pengelolaan Pariwisata Kolektif dan Kolaboratif

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa salah satu permasalahan yang ada di Wonorejo adalah pengelolaan pariwisata yang dilakukan secara mandiri oleh warga masyarakat Desa Wonorejo. Namun, tim peneliti berasumsi bahwa pengelolaan secara mandiri ini yang justru memperlambat peningkatan kesejahteraan masyarakat Wonorejo sendiri. Jika konsep idealnya adalah pemerataan kesejahteraan, maka pengelolaan pariwisata secara mandiri ini belum bisa mencapai konsep ideal tersebut. Terbukti dari cermin lingkungan masyarakat yang masih memperlihatkan ketimpangan antara warga yang tinggal dekat hutan dengan warga yang tinggal dekat dengan laut. Kelemahan lain dengan pengelolaan secara mandiri adalah kurangnya akomodasi dari pemerintah desa. Pada akhirnya pemerintah desa seakan hanya menjalankan fungsi administrasi, begitu juga dengan para perangkat desa yang hanya menjalankan fungsi administrasi. Padahal baik pemerintah desa maupun aparatnya dapat menjalankan fungsi direksi dan inspirasi sebagaimana telah dijelaskan dalam konsep kepemimpinan.

Maka tim peneliti menilai sudah harus dilakukan inisiasi untuk program pengelolaan kepariwisataan yang lebih kolektif. Hal ini penting dilakukan untuk mengaktifkan kembali organisasi-organisasi pemerintah desa yang selama ini masih pasif. Dengan pengelolaan kepariwisataan yang lebih kolektif, komponen-komponen pemerintah desa yang lain, seperti BUMDes (Badan Usaha Milik Desa), Karang Taruna, dan Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata), akan lebih giat dan aktif juga. Ketika semua komponen pemerintahan desa tersebut kembali berjalan, atau mulai berjalan, maka kegiatan di desa tidak akan berhenti. BUMDes akan menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan Desa Wonorejo. Sedangkan Karang Taruna akan semakin sibuk dengan urusan-urusan kepemudaan desa. Pokdarwis juga akan semakin

memiliki program dan kegiatan karena pengelolaan kepariwisataan kolektif artinya pokdarwis juga memiliki wewenang lebih untuk turut mengelola kepariwisataan.

Jika pengelolaan kepariwisataan dilakukan dengan kolektif, tentu pihak yang diuntungkan lebih banyak. Selain keuntungan dari pengelolaan pariwisata yang mengalir ke masing-masing keluarga, pemerintah desa melalui pokdarwis ataupun BUMDes juga bisa mendapatkan sedikit keuntungan dari pengelolaan kolektif tersebut. Hasil dari keuntungan yang didapat oleh pemerintah desa harus dimanfaatkan untuk kepentingan kolektif juga, misalnya untuk keperluan mengadakan kegiatan tahunan seperti Bersih Desa atau Petik Laut, bisa juga untuk mengakomodasi kebutuhan mendasar warga masyarakat Desa Wonorejo, seperti pembiayaan listrik atau bantuan pendidikan.

Selain daya kolektifitas dalam pengelolaan kepariwisataan di Desa Wonorejo, secara geografis Desa Wonorejo memiliki peluang kolaborasi dengan Taman Nasional Baluran yang disebut sebagai “Africa Van Java” melalui daya tarik wisata yang dapat menunjang keberlangsungan wisata kebangsaan desa wonorejo. Wisata berbasis konservasi dengan segala komponen di dalamnya dapat menjadi pemeran atas literasi pariwisata terhadap masyarakat, dengan bekal semangat konservasi yang berorientasi ekowisata, kiranya juga bisa dijadikan variabel tidak langsung guna memperkuat sikap toleransi yang sudah mulai tumbuh dengan baik.

## **2. Pemerataan Kesejahteraan Berkebangsaan**

Jika pengelolaan kepariwisataan dan banyak sektor lainnya dilakukan secara kolektif sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka probabilitas untuk melakukan pemerataan kesejahteraan warga desa menjadi lebih memungkinkan. Sebagaimana yang telah dipostulatkan oleh pendekatan ABCD dan ekowisata, yang mana keduanya menggarisbawahi pentingnya melibatkan kelompok masyarakat lokal, maka pengelolaan kolektif akan mendorong kolektivitas yang dimiliki oleh Desa Wonorejo menjadi lebih besar. Bahkan mungkin dengan mendorong kolektivitas dalam hal pengelolaan, maka kesadaran masyarakat Desa Wonorejo akan lebih luas perihal pemerataan kesejahteraan.

Dalam rangka untuk memulai langkah-langkah kolektivitas pengembangan dan pembangunan kepariwisataan desa, ada banyak mekanisme yang bisa dilakukan oleh pemerintah desa maupun para local champion. Namun yang paling penting dari pengembangan dan pembangunan kepariwisataan desa ini adalah landasan label “kebangsaan” yang harus menjadi fondasi pengembangan dan pembangunan. Jangan sampai dalam prosesnya label tersebut hanya menjadi label tanpa ada perwujudan baik dari pemerintah desa, para local champion, pun dengan masyarakat Wonorejo sendiri. Oleh karena itu, berkaitan dengan pengembangan dan pembangunan kepariwisataan Desa Wonorejo yang berbasiskan kolektivitas lokal, maka kesadaran akan pentingnya label “kebangsaan” bagi masyarakat Desa Wonorejo wajib dipahami dan ditingkatkan.

Menurut wawancara dari Trisno dan Slamet beserta beberapa penduduk Desa Wonorejo, dua kunci dari kesejahteraan Wonorejo selama ini adalah pluralisme dan toleransi. Label kebangsaan yang selama ini tersemat kepada Desa Wonorejo sejatinya terbangun dari pluralisme dan toleransi. Menurut data yang tim peneliti dapatkan, corak keberagaman warga Desa Wonorejo memang relatif tinggi. Mulai dari agama sampai mata pencaharian. Hal ini yang membuat Desa Wonorejo menjadi desa yang sangat plural ketimbang desa-desa yang banyak ditemui. Pluralisme ini juga ditunjukkan dengan simbol-simbol seperti tempat ibadah (pura, gereja, masjid), corak kegiatan, dan beberapa sarana-prasarana publik yang ada di Desa Wonorejo.



Gambar 3. Kunjungan tim peneliti dan tim pendamping ke Makam Kebangsaan, makam warga desa dengan berbagai corak keagamaan.  
(sumber: dokumentasi peneliti)

Salah satu infrastruktur publik yang menarik adalah Makam Kebangsaan. Warga Wonorejo menyebut makam desa sebagai Makam Kebangsaan karena warga yang dikuburkan di makam tersebut berasal dari corak agama yang berbeda-beda dan tetapi dijadikan dalam satu makam. Makam ini juga sudah lama berada di desa, dan bahkan sebelum terdapat sematan label “kebangsaan” di Desa Wonorejo. Hal ini membuktikan bahwa pluralisme memang ada di Desa Wonorejo. Pluralisme ini disinyalir terbangun juga karena mayoritas warga Desa Wonorejo adalah pendatang yang berasal dari daerah yang berbeda-beda. Kenyataan ini bisa menjadi landasan argumentasi bahwa “kebangsaan” yang dimiliki oleh masyarakat Desa Wonorejo bukan hanya sebagai label, akan tetapi juga roh dan kekayaan intelektual warga masyarakat desa tersebut.

Tim peneliti juga menemukan masjid dan pura sebagai tempat ibadah masing-masing agama (Islam dan Hindu), yang dibangun berdekatan. Bahkan menurut Slamet, pembangunan masjid dan pura di Desa Wonorejo mengandalkan gotong royong sesama warga. Orang Hindu dan Kristen juga ikut berpartisipasi dalam membangun masjid tempat ibadah orang Islam. Begitu juga dengan orang Islam yang ikut berpartisipasi dalam pembangunan tempat ibadah dari agama lain, baik warga yang beragama Hindu (pura) maupun warga yang beragama Kristen (gereja). Bentuk gotong royong yang dilakukan warga Desa Wonorejo juga bermacam-macam, bisa melalui sumbangan tenaga, sumbangan pangan, maupun sumbangan dana.



Gambar 4. Salah satu pura yang didirikan berdekatan dengan masjid di Desa Wonorejo.  
(sumber: dokumentasi peneliti)

Kunci sosial lain yang dimiliki oleh warga masyarakat Desa Wonorejo adalah toleransi yang tinggi. Kesamaan nasib dan sejarah sebagai sesama warga Wonorejo membuat para warga memiliki toleransi yang sangat tinggi. Toleransi ini pada banyak aspek telah memperkuat pluralisme yang ada di Desa Wonorejo. Sedangkan pada sisi yang lain, toleransi ini semakin memperteguh label “kebangsaan” yang memang terciptakan dengan toleransi, gotong royong, dan pluralisme. Toleransi warga juga terlihat dari aspek sosial dan ekonomi, yang mana setiap apapun mata pencaharian yang dijadikan sumber kehidupan warga desa maka tidak ada perbedaan yang muncul dari pemerintah desa. Perbedaan-perbedaan yang ada hanya muncul secara organik dari dinamika yang ada dalam proses sosial ekonomi.

Baik pluralisme dan toleransi yang telah sedikit dibahas, secara langsung maupun tidak langsung telah mempengaruhi bingkai politik Desa Wonorejo. Hal ini tercermin dari karakteristik kepemimpinan desa yang lebih mengutamakan tenggang rasa dan akomodasi terhadap apa yang diaspirasikan oleh banyak warga desa. Namun ada sisi yang menurut tim peneliti bisa menjadi bumerang bagi entitas kepemimpinan maupun bagi kelompok masyarakat lokal. Dikarenakan karakteristik kepemimpinan yang lebih “pasif” dan “akomodatif” maka karakteristik kepemimpinan ini bisa jadi menyebabkan kurang adanya gebrakan dan gerakan yang inovatif di desa. Masyarakat Desa Wonorejo harus mampu menciptakan yang karakter kepemimpinan tidak hanya akomodatif, tapi juga mampu menstimulus inovasi-inovasi yang berkembang di Desa Wonorejo itu sendiri.

## SIMPULAN

Desa Wonorejo yang terletak di dekat Taman Nasional Baluran dan timur pantai Jawa sebenarnya memiliki aset kepariwisataan yang sangat berpotensi untuk bisa mendongkrak kesejahteraan masyarakat Wonorejo. Namun desa ini masih memiliki beberapa potensi permasalahan, yakni 1) pengelolaan, 2) pemerataan kesejahteraan, dan 3) kepemimpinan. Untuk mencoba menelaah permasalahan-permasalahan tersebut sekaligus mencari solusi alternatif bagi masyarakat Desa Wonorejo, tim peneliti telah melakukan penelitian lapangan dan melakukan kajian dengan menggunakan pendekatan ABCD, konsep ekowisata, dan kepemimpinan itu sendiri. Dengan pendekatan dan beberapa konsep yang telah dipilih, tim peneliti berharap temuan-temuan yang telah dituliskan dalam artikel ini dapat menjadi pijakan untuk penelitian atau kegiatan pengabdian masyarakat yang relevan di masa depan.

Desa “Kebangsaan” Wonorejo harus memulai untuk belajar membangun dan mengembangkan pengelolaan kepariwisataan yang kolektif alih-alih pengelolaan yang mandiri. Dengan adanya kolektivitas yang tinggi, yang didukung oleh fondasi pluralisme dan toleransi yang kental di masyarakat desa, tim peneliti percaya bahwa Desa “Kebangsaan” Wonorejo akan menjadi destinasi wisata yang tidak hanya mengandalkan keindahan dan konservasi alam, namun juga menyediakan miniatur negara Indonesia yang dikemas dalam bentuk desa. Para aparat pemerintah desa harus mulai mengembangkan ide atau gagasan-gagasan inovatif yang bisa meningkatkan partisipasi dan kontribusi masyarakat Desa Wonorejo terhadap perkembangan kepariwisataan desa. Namun yang sekiranya perlu diantisipasi adalah dengan adanya dinamika untuk bergerak maju, maka bisa jadi akan ada pergolakan di dalam masyarakat desa itu sendiri. Hal inilah yang harus diantisipasi oleh pemerintah desa maupun para *local champion* yang ada di Wonorejo dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kepariwisataan Desa Wonorejo.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih dihaturkan oleh tim peneliti pertama dan utamanya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa (YMK) sehingga artikel penelitian ini dapat terwujud dan selesai sebagaimana diharapkan. Kami juga berterima kasih banyak kepada jajaran pemerintah Desa Wonorejo, Kab. Situbondo dan masyarakat desa yang sangat ramah dan dapat menerima kami walaupun dalam kondisi di tengah pandemi. Kami juga berterima kasih atas dampingan yang dihadirkan oleh tim Yayasan Genta Purwa Desawarnana yang telah mendampingi masyarakat Desa Wonorejo sehingga kami mendapatkan kesempatan untuk ikut membantu Desa Wonorejo berkembang lebih baik lagi. Tak lupa kami ucapkan banyak terima kasih kepada rekan dan sejawat di UPN “Veteran” Jawa Timur dan CGaS yang telah bahu-membahu bekerjasama dalam gerakan-gerakan meningkatkan aset daerah di seluruh Indonesia. Semoga artikel ini menjadi salah satu landasan ilmiah yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Wonorejo secara khusus, dan Indonesia secara umum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ancona, D., *et al.*. 1998. “In Praise of the Incomplete Leader”. *HBR’s 10 Must Read on Leadership*. Boston: Harvard University Press.
- Arida, I. N. S. 2017. *Ekowisata: Pengembangan, Partisipasi Lokal, dan Tantangan Ekowisata*. Denpasar: Cakra Press.
- Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Nias Selatan (bekerjasama dengan UNESCO). 2009. *Ekowisata: Panduan Dasar Pelaksanaan*. Teluk Dalam, Nias Selatan.
- Dureau, C.. 2013. *Pembaru dan Kekuatan Lokal untuk Pembangunan*. Australian Community Development and Civil Society Strengthening Scheme (ACCESS) Phase 2.
- Dwiridhotjahjono, J., Wibowo, P. Nuryananda, P. F. 2020. “Bamboonomic: Ekonomi Bambu Pendukung Desa Wisata Tegaren”. *Jurnal Master Pariwisata*, Vol. 6, No. 2, Januari 2020. DOI: <https://doi.org/10.24843/JUMPA.2020.v06.i02.p01>.
- Goffee, R., dan Jones, G. 1998. “Why Should Anyone be Led by You?”. *HBR’s 10 Must Read on Leadership*. Boston: Harvard University Press.
- Kretzmann, J., dan McKnight, J. 1993. *Building Communities from the Inside Out: A Parth Toward Finding and Mobilizing a Community’s Assets*. The Asset Based Community Development Institute, Institute for Policy Research. Illinois: Northwestern University.
- Russel, C. 2016. *Sustainable Community Development – from what’s wrong to what’s strong*. TED<sup>x</sup> Exeter. (daring). Tersedia di: <https://www.youtube.com/watch?v=a5xR4QB1ADw>. Diakses pada: 27 September 2018.
- Satori, D., dan Komanah, A. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Ziku, R. M.. 2015. “Partisipasi Masyarakat Desa Komodo dalam Pengembangan Ekowisata di Pulau Komodo”. *Jurnal Master Pariwisata*, Vol. 2, No. 1, September 2015. DOI: <https://doi.org/10.24843/JUMPA.2015.v02.i01.p01>.